

Hal-hal praktis dalam melaksanakan Polmas : Belajar dari Pengalaman pada Koban dan Chuzaisho

Suzuki Motoyuki¹

Pendahuluan

Sejak berpisah dari militer pada tahun 2000, reformasi Polri sedang berkembang. Konsep pusat reformasi itu adalah perpolisian masyarakat atau Polmas. Mengenai Polmas, beberapa panduan seperti Skep Kapolri 737 sudah dimunculkan, di banyak Polda bermacam kebijaksanaan dilaksanakan misalnya membentuk FKPM, membangun BKPM atau Balai Polmas, dll. Selain itu, beberapa seminar disertai diskusi sering diselenggarakan serta bermacam pelatihan dilaksanakan untuk orang-orang dengan berbagai tugas.

JICA, Japan International Cooperation Agency, juga membantu reformasi ini. Beberapa BKPM dibangun di Bekasi oleh JICA sebagai *pilot project* untuk mewujudkan kegiatan *community policing* seperti patroli, kunjungan, konsultasi, kemitraan dengan FKPM, dll, sehingga kegiatan itu dapat dilihat oleh petugas di Polres lain atau Polda lain untuk mengembangkan Polmas di daerah masing-masing. Selain itu, beberapa anggota Polri yang muda mengikuti pelatihan di Jepang setiap tahunnya.

Sekarang semua Polda berusaha mempercepat perkembangan Polmas masing-masing. Ada yang maju, ada yang kurang maju. Dan ada yang walaupun kelihatannya sukses, ternyata tidak begitu dikembangkan. Mungkin saat menyebarkan benih sudah lewat. Saat ini adalah waktu benih Polmas harus mengakar. Ibarat benih padi yang masih memiliki banyak kesulitan yang harus dijinakkan. Tulisan ini dimaksudkan untuk mendiskusikan beberapa hal praktis yang sebaiknya diperhatikan untuk mengembangkan 'padi' Polmas.

1. Pendekatan Polmas

Selama ini misi dan visi Polmas sudah diskusikan di berbagai pertemuan, seminar, buku-buku, dll. Menurut penulis keamanan wilayah, daerah, dan negara itu tidak bisa diwujudkan tanpa kepercayaan masyarakat kepada Polri,

1 Suzuki Motoyuki, Tenaga Ahli JICA Bidang Polmas, Senior Superintendent Kepolisian Jepang.

Polri harus mengembangkan Polmas dengan kemitraan dengan masyarakat agar mendapat kepercayaannya.

Konsep Polmas -Perpolisian Masyarakat- itu seharusnya mengandung beberapa konsep, misalnya *Community policing*, *Community Oriented Policing*, *Democracy*, Hak Asasi Manusia, Transparansi, dll. Di sini penulis mengambil dua pendekatan Polmas sebagai yang utama.

A. Kepolisian untuk masyarakat

Memang gaji petugas polisi dan fasilitas kepolisian itu dikeluarkan dari pajak yang merupakan hasil kerja masyarakat dengan keringat dan air mata. Karena itu, pada orde demokrasi, petugas polisi harus bekerja untuk masyarakat, yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Hal ini tidak hanya bagi petugas polmas seperti babinkamtibmas tetapi bagi seluruh anggota kepolisian, termasuk petugas reserse, petugas intel, petugas lalu lintas, dll. Selama tugas, mereka harus ingat bahwa mereka bekerja untuk masyarakat. Kalaupun mereka tidak melayani masyarakat secara langsung, harus berhati-hati agar tidak lupa keberadaan masyarakat.

B. Petugas Polmas

Sementara itu, petugas Polmas, seperti babinkamtibmas, dianggap sebagai petugas yang melayani masyarakat secara langsung, misalnya patroli, memberi informasi, memberi konsultasi, dll. Karena anggota Samapta juga melaksanakan patroli, dan sebagian Brimob mulai melaksanakan sambang, maka ada kemungkinan yang menganggap mereka sebagai petugas polmas masa depan.

Di kepolisian Jepang ada bidang *community police* dan kira-kira 35 persen anggota Kepolisian Jepang bekerja di bidang ini. Petugas *community police* itu biasanya bekerja di tempat yang bernama *koban* atau *chuzaisho* kecuali petugas patroli bermobil. Sekarang di Jepang ada 6.185 *koban* dan 7.123 *chuzaisho*. *Koban* biasanya ditempatkan di perkotaan. Pada dasarnya, tiap *koban* dioperasikan oleh sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang petugas *community police* atau lebih dalam tiap shift 24 jam. Sementara itu, *chuzaisho* biasanya ditempatkan di pedesaan. Pada dasarnya, tiap *chuzaisho*

dioperasikan oleh seorang petugas *community police* yang bertempat tinggal di sana dengan keluarganya.

Situasi keamanan Jepang disebut sangat bagus karena petugas *community police* masuk ke dalam masyarakat dan bekerja di kantor yang ditempatkan di dalam masyarakat.

Sebagian besar dalam tulisan ini berbicara mengenai petugas polmas dan lingkungannya, karena mereka bekerja sangat dekat dengan masyarakat untuk dapat mengembangkan Polmas dan meraih kepercayaan masyarakat.

2. Kegiatan Petugas Polmas

Berbagai kegiatan petugas polmas dijelaskan sebagai pelayanan dekat dengan masyarakat. Kegiatan petugas polmas bisa dibagi ke dalam tiga jenis.

A. Memahami Situasi

Waktu mulai pelayanan kepada masyarakat, petugas polmas harus memahami atau mengetahui situasi wilayahnya dan permintaan masyarakat dulu. Untuk memahami wilayah, ada beberapa kegiatan yang utama.

B. Menyelesaikan masalah

Kalau ditemukan beberapa masalah di wilayah, polisi melaksanakan kegiatan menangani masalah, misalnya kasus kriminal, kecelakaan lalu lintas, anak tersesat, dll. Pencegahan masalah juga kegiatan yang penting.

C. Memberikan informasi

Untuk mendapat pemahaman dan kerjasama dari masyarakat, petugas polmas perlu memberikan informasi tentang keamanan wilayah, misalnya pencurian bertambah di wilayah ini, banyak kecelakaan terjadi di tempat ini, harus menguncikan pintu sepanjang malam, dll. Dengan informasi seperti ini, masyarakat bisa bertindak terhadap kemungkinan kejahatan atau kecelakaan, sehingga kasus kejadian bisa ditekan. Apalagi menginformasikan kegiatan petugas polisi kepada masyarakat berarti bahwa polisi memenuhi akuntabilitas publik, sehingga masyarakat merasa aman. Hal ini menambahkan kepercayaan masyarakat kepada petugas polisi.

D. Kegiatan nyata

Kegiatan berikut adalah contoh utama yang perlu dilaksanakan petugas polmas di Jepang dan bisa dilaksanakan di Indonesia. Ada kegiatan yang mempunyai dua atau tiga fungsi antara A, B, dan C tersebut.

a. Patroli

Petugas polmas perlu melaksanakan patroli untuk memahami setempat. Di Indonesia biasanya mereka pakai mobil atau sepeda motor, sedangkan di Jepang patroli berjalan kaki atau dengan sepeda itu direkomendasi karena kadang-kadang susah berbicara dengan masyarakat dan memahami situasi dan permintaan masyarakat kalau berjalan agak cepat.

Waktu melaksanakan patroli, perlu membuat dulu rencana patroli agar memaksimalkan hasil patroli. Pemimpin sebaiknya memberi nasihat kepada petugas polmas secara nyata, misalnya mencatat tempat berbahaya, perempatan dengan banyak lantas, tempat ada banyak remaja, dll.

Sambil patroli, petugas polmas harus mengawasi situasi wilayah dan jalan-jalan secara detil. Apalagi, selama patroli petugas polmas menanyai orang-orang yang terlihat mencurigakan, memeriksa tempat yang rawan kecelakaan dan memberikan bimbingan pencegahan kejahatan pada keluarga di daerah yang cenderung sering terjadi kejahatan.

Selain itu, kalau menemukan orang-orang dalam situasi kesulitan, harus membantu masyarakat dengan tulus.

b. Kunjungan

Untuk memahami permintaan masyarakat, berkunjung ke rumah-rumah masyarakat dan berbicara secara langsung itu sangat bermanfaat. Di Jepang, petugas polisi mempunyai wilayah masing-masing dan berkunjung ke rumah-rumah secara terencana. Yang penting adalah berkunjung ke semua masyarakat, tidak hanya tokoh masyarakat tetapi masyarakat lain karena petugas polmas perlu mengetahui berbagai permintaan dan informasi.

Sambil kunjungan, petugas polmas juga memberi saran untuk pencegahan kejahatan dan kecelakaan kepada masyarakat. Kalau informasi dan nasihat petugas itu berguna bagi masyarakat, masyarakat bisa menyambut kunjungan itu dan memercayai petugasnya.

c. Pertemuan FKPM

Petugas polmas bisa memahami situasi dan permintaan masyarakat lewat pertemuan dengan masyarakat seperti FKPM. Pada pertemuan itu, petugas polmas dan masyarakat berdiskusi tentang keamanan wilayahnya dan saling tukar-menukar informasi, sehingga dua pihaknya bisa memahami situasi keamanan dan hubungan kerjasama meningkat.

d. Penyediaan informasi

Petugas polmas bisa menyediakan informasi sesuai kebutuhan untuk masyarakat surat kabar mini, buletin, radio, dll. Di pospol Pekayon di Bekasi, pengabaran keamanan diinformasikan lewat radio yang dioperasikan oleh FKPM.

e. lain-lain

Selain itu, petugas polmas harus melakukan kegiatan yang sesuai dengan pelbagai jenis situasi. Misalnya, pergi ke TKP lebih dulu dan melakukan TP (Tindakan Pertama) di TKP, mempertahankan status quo TKP, P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan), mengatur kerumunan massa, mengatur lalu lintas, dll.

Karena kegiatan itu dilaksanakan sangat dekat dengan masyarakat, petugas polmas perlu selalu merasakan keberadaan masyarakat dan menyangar kebutuhan masyarakat.

3. Masuk ke dalam Masyarakat

Untuk memaksimalkan efek Polmas, petugas polisi perlu bekerja dekat dengan masyarakat sebagai petugas polmas. Seharusnya mereka bisa dihubungi masyarakat tanpa prosedur sulit dan datang ke tempat masyarakat dengan cepat. Untuk mewujudkan hal ini, mereka harus masuk ke dalam masyarakat sehari-hari.

Di Jepang petugas *community police* berada di *koban* atau *chuzai-sho* selama 24 jam yang terletak dalam pemukiman, pertokoan, perkantoran, kawasan hiburan, dll. Wilayah-wilayahnya diperuntukkan kepada setiap *koban* atau *chuzai-sho*, dan setiap *koban* dan *chuzai-sho* bertanggung jawab dengan keamanan wilayahnya. Karena itu, mereka bisa datang ke tempat kasus kejadian dengan pasti dan cepat.

Di Indonesia, petugas babinkamtibmas bekerja di dalam masyarakat sebagai petugas polmas. Mereka juga berusaha agar memahami situasi wilayah yang diuntukkan kepadanya. Tetapi kadang-kadang mereka merasa sulit menagani kasus-kasus di wilayahnya, karena wilayahnya terlalu luas, rumah mereka sangat jauh dari wilayahnya, mereka dibebankan tugas lain, dan lain-lain.

Umumnya petugas babinkamtibmas tidak mempunyai kantor mandiri. Kantor mereka adalah Polsek dan mereka kadang-kadang mampir ke kantor Kelurahan, Desa atau rumah tokoh masyarakat. Tetapi sekarang ada beberapa contoh bahwa petugas polmas mendapat kantor sendiri.

Dalam catatan penulis dari berbagai kunjungan yang pernah dilakukan, di Polres Palangkaraya Polda Kalimantan tengah, mereka mendapat kantor babinkamtibmas yang bernama BKPM (Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat) di dalam kantor Kelurahan dengan bantuan Kota madya dan Kelurahan. Kantor itu bisa digunakan sebagai kantor FKPM.

Di Polsek Taman Sari Polres Jakbar Polda Metro Jaya, ada kantor babinkamtibmas bernama 'Pos Polmas' yang terletak dekat dari rumah petugas babinkamtibmas. Kantor itu sangat dekat dari rumahnya, petugas selalu bisa datang ke kantor secara cepat walaupun malam.

Terlebih lagi, di Polres Kabupaten Bekasi Polda Metro Jaya, ada beberapa kantor babinkamtibmas di mana petugas babinkamtibmas tinggal dengan keluarganya. Bangunan itu, yang bernama Balai Polmas, mempunyai dua fungsi baik rumah maupun kantor seperti *chuzai-sho* Jepang.

Ada contoh bangunan mandiri yang digunakan sebagai kantor babinkamtibmas dan FKPM. Di Polres Kotim Polda Kalteng ada kantor bernama BKPM yang besar dengan fasilitas cukup. Di dalamnya ada kantor petugas babinkamtibmas, kantor ketua FKPM, ruangan pertemuan, dll.

Balai itu dibangun dengan bantuan dari Kabupaten. Apalagi di sana ada beberapa BKPM lain yang dibangun atas bantuan masyarakat.

BKPM itu seharusnya tempat polisi dan masyarakat bekerjasama, tetapi sekarang sifatnya bermacam-macam. Misalnya ada BKPM sebagai tempat anggota FKPM kadang-kadang berkumpul, ada jaga yang sebagai kantor babinkamtibmas, ada yang ternyata sebagai pos pol. Di BKPM di Bekasi, beberapa petugas BKPM bekerja secara shift dan melaksanakan patroli, kunjungan, konsultasi seperti *koban* Jepang. Mereka melaksanakan kegiatan itu secara berencana dan rutin, dan mencatat semua kegiatan mereka agar bisa dilaporkan.

Selain itu, di Polres Jakut Polda Metro Jaya, anggota Polsek ditunjuk sebagai polisi RW yang mengurus RW yang dibagikan. Mereka sering berkunjung ke kantor RW masing-masing dan kalau masyarakat memanggil polisi RW karena ada satu masalah, mereka datang dan menagani itu. Menurut seorang masyarakat, sistem polisi RW mendekatkan polisi dengan masyarakat.

4. FKPM

Sekarang di seluruh Indonesia FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) sedang dibentuk. Fungsi FKPM diharapkan menjadi jembatan antara polisi dan masyarakat. Anggota FKPM dipilih dari masyarakat, dan mereka sering menyelenggarakan pertemuan dengan pihak polisi untuk menginformasikan kebutuhan masyarakat kepada polisi dan kabar keamanan dari polisi kepada masyarakat.

Di Jepang juga ada forum seperti FKPM di wilayah *koban* dan *chuzai*sho. Sedangkan kegiatan forum di Jepang itu untuk tukar-menukar informasi, FKPM di Indonesia memiliki fungsi lain, yaitu menyelesaikan masalah kecil. FKPM diharapkan menyelesaikan masalah yang bukan tindak kriminal, misalnya perkelahian antara keluarga atau kenalan, kenakalan anak seperti merokok, minuman keras, dll. Kadang-kadang ada FKPM yang sangat semangat dan rajin untuk berpatroli dengan jas seragam.

Selain forum itu, di Jepang banyak lembaga sukarela melakukan kegiatan untuk mencegah kejahatan dan kecelakaan. Misalnya, setiap pagi dan sore beberapa sukarelawan berdiri di perempatan lalu lintas dengan

mengenakan ban tangan dan mengawasi anak-anak pergi dan pulang dari sekolah dengan aman. Sementara di Polwil Semarang Polda Jateng ada FKPM bidang Lalu Lintas yang anggotanya kelompok-kelompok penggemar sepeda motor, toko-toko terkait dengan mobil dan motor, dll. Mereka melakukan gerakan keamanan lalu lintas dan mengintervensi perkuliahan pengguna jalan bekerjasama dengan polisi.

Dengan membentuk FKPM, beberapa permasalahan juga muncul. Ada masyarakat yang tidak semangat untuk membentuk FKPM. Ada konflik antara FKPM dan lembaga lain misalnya Pokdar. Ada FKPM yang meminta gaji dan baju seragam kepada polisi. Ada FKPM yang juga bersikap represif terhadap masyarakat lain. Masih perlu banyak waktu untuk memahami FKPM diterima oleh masyarakat.

5. Pengendalian Petugas Polmas

Dalam melaksanakan kebijakan Polmas, meskipun panduan dan peraturannya sangat bagus, Polmas tidak akan sukses tanpa adanya pengendalian yang sesuai. Misalnya, pemimpin menyuruh petugas polmas melakukan kunjungan atau sambang ke rumah-rumah masyarakat setiap hari, ada kemungkinan petugas polmas tidak melakukannya sama sekali atau melakukan kunjungan hanya ke rumah yang sudah sering dikunjungi. Atau meski pemimpin telah memerintahkan petugas polmas agar dapat dihubungi 24 jam oleh masyarakat, ada kemungkinan petugas itu malas sehingga masyarakat memiliki keluhan terhadap polisi.

Apakah semua kapolsek sudah dapat mengendalikan kegiatan-kegiatan petugas polmas? Kalau ditanya, mungkin semua kapolsek menjawab sudah. Tetapi bagaimana hal ini jika dikaji? Biasanya kapolsek sangat sibuk dari pagi hari sampai larut malam. Terlebih lagi biasanya petugas polmas bekerja sendiri di tempat yang jauh dari polsek. Makanya mereka sulit mengecek semua kegiatan petugas polmas dengan mata sendiri.

Di Jepang, kalau salah seorang bawahan malas sehingga tugasnya tidak berjalan, tidak hanya bawahan itu tetapi atasannya juga disalahkan dan dibebankan sanksi atas kurangnya pengendalian. Karena itu, mereka sangat memperhatikan bagaimana bawahannya bersikap dan berbuat. Misalnya pemimpin petugas *koban* harus menyambangi *koban-koban* secara rutin, dan

waktu berkunjung ke *koban*, mereka harus mencatat situasi perlengkapan *koban* dan dokumen kerja serta cek kegiatan petugas *koban*. Apalagi, setiap *koban* dilengkapi buku mutasi kerja yang dituliskan setiap kegiatan petugas *koban*, misalnya,

- 10.05 Cek keadaan dalam *koban* dan perbekalan. Tak ada masalah
- 11.20 Patroli. Berangkat ke Wilayah A. *Suzuki, Ermiady*
- 12.05 Kembali. Selama patroli, Mengajukan pertanyaan 5 kali, memberitahukan jalan 2 kali
- 14.20 Konsultasi. Pak Andi datang untuk...diurus *Ermiady*
- 15:15 Istirahat. *Suzuki*, dll.

Dengan catatan itu, kalau ada masalah, bisa mengkaji dan mengecek mundur kegiatan petugas. Sistem ini diterapkan di semua *koban* Jepang.

6. Menilai Petugas Polmas

Kalaupun petugas polmas dikendalikan secara ketat, semangat dan motivasi untuk tugasnya tidak meningkat tanpa ada penilaian terhadap hasilnya. Hasil-hasil kerja petugas polmas perlu diberikan penghargaan dengan gaji (termasuk tunjangan dan THR) dan promosi, misalnya.

Untuk menilai petugas polmas dengan adil, harus membuat standar. Karena petugas polmas dan penilainya memiliki kemungkinan dipindah ke mana-mana di seluruh Polda, sebaiknya standarnya dibentuk secara bersama di dalam Polda. Bahkan, standarnya perlu dibentuk secara konkret agar siapapun penilai bisa menilai petugas polmas dengan adil dengan standarnya.

Dalam membuat standar nilai Polmas, kalau jumlah kasus kriminal kejadian turun, apakah ini dianggap sebagai hasil Polmas? Memang keturunan kejahatan adalah hasil bagus. Tetapi dengan mengembangkan Polmas, masyarakat merasa dekat dengan polisi sehingga jumlah informasi dari masyarakat, termasuk kasus kriminal yang tidak disampaikan dulu, akan meningkat. Dalam hal ini, tambahan kasus kriminal yang dilaporkan tidak berarti kegagalan pengembangan Polmas.

Di Jepang, standar untuk menilai petugas polmas dibentuk oleh masing-masing Polda. Misalnya, jumlah masalah diselesaikan dengan pertanyaan di jalan, jumlah rumah yang dikunjungi, jumlah gerakan keamanan masyarakat yang diselenggarakan, jumlah kasus yang tidak bagus, dll adalah poin-poin yang diperhitungkan dalam menilai petugas polmas. Dan kadang-kadang petugas polmas yang paling bagus diberikan penghargaan oleh Kapolda.

Kegiatan petugas polmas tidak menyolok seperti menangkap penjahat besar atau menyita banyak narkoba. Karena itu, kegiatan polmas cenderung tidak diliput media massa dengan spektakuler. Tetapi kegiatan petugas polmas sehari-hari itu perlu untuk mendapat kepercayaan masyarakat. Untuk meningkat kinerja mereka, kegiatannya dinilai dengan sesuai.

7. Lain-lain

Untuk membuat Polri yang dipercaya oleh masyarakat, masih ada beberapa hal-hal yang penting. Di antaranya, bidang identifikasi yang dibantu Kepolisian Jepang.

Dari segi kepercayaan masyarakat, kalau polisi datang ke tempat kasus pencurian dengan kegiatan identifikasi seperti mengambil sidik jari dan barang bukti lain yang dirasa kurang, bagaimana perasaan masyarakat? Kadang-kadang barang bukti dirusak oleh kerumunan massa dan wartawan. Petugas polisi perlu kemampuan status quo TKP dan identifikasi mendasar untuk menangani kasus yang dekat masyarakat dengan tulus, sehingga polisi mendapat kepercayaan.

Apalagi, dari segi kepentingan *scientific crime investigation*, titik berat penyelidikan harus dipindah ke barang bukti dari 'orang bukti' seperti saksi. Kehidupan sosial Indonesia sedang berada dalam berbagai perubahan. Sistem sosial dan keadaan komunitas berubah, hubungan masyarakat menjadi rumit. Berbagai orang masuk ke dalam komunitas dan kasus kriminal juga menjadi beragam dan sulit. Dan rasa HAM juga sedang meningkat. Melihat faktor tersebut, sebentar lagi kasus kriminal menjadi sulit diselesaikan dengan hanya berdasar pada pengakuan dan saksi mata.

Di Jepang, semua sidik jari orang yang ditangkap diambil dan dikumpulkan dalam database. Database itu bisa digunakan di seluruh Jepang dengan aturan tegas. Mengambil banyak sidik jari setiap hari itu adalah kerja yang

tidak menyolok tetapi perlu kegigihan. Karena menyusun kegigihan puluhan tahun, database itu sangat digunakan dan dipercayai.

Di Indonesia juga, 'seharusnya' sidik jari diambil dan dikumpulkan dalam database. Sebaiknya dua pihak baik penyelidik maupun identifikasi memahami kepentingan barang bukti seperti sidik jari, sehingga menggunakan itu secara maksimal.

8. Penutup

Hal-hal pembahasan tersebut sebaiknya diperhatikan dalam implimentasi Polmas di daerah-daerah. Memang situasinya berbeda-beda yang tergantung daerahnya, tetapi juga ada masalah bersama di beberapa daerah. Untuk memecahkan masalah ini, sebaiknya tukar-menukar informasi antar Polda-Polda.

Sekarang, dengan daya upaya banyak petugas polisi, 'padi' Polmas mulai tumbuh bertahap. Menurut pengalaman, hubungan polisi dan masyarakat menjadi makin dekat, maka harapan masyarakat kepada polisi menjadi makin besar. Ketika Polri menerima harapan yang besar ini, fase Polmas yang baru akan mulai. (*)